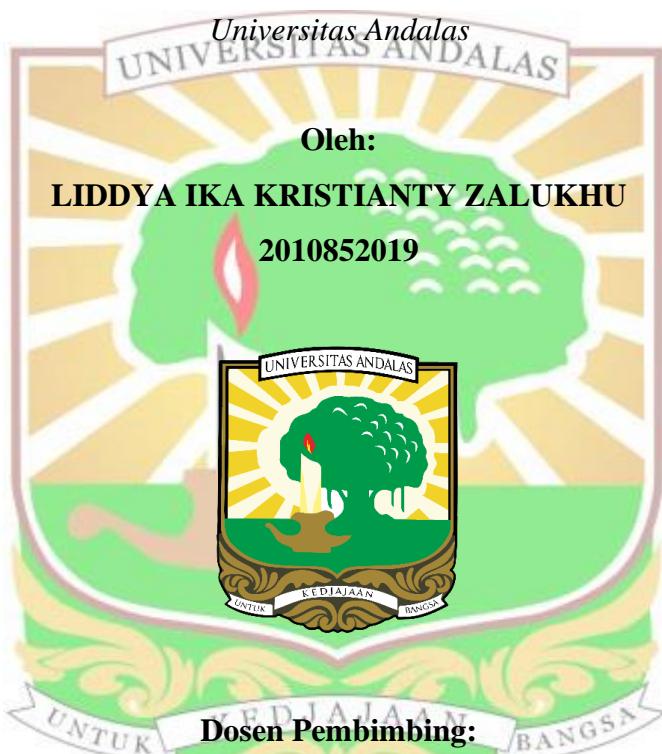


**PERAN UNI AFRIKA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK  
ANTARA TIGRAY PEOPLE'S LIBERATION FRONT (TPLF)  
DAN PEMERINTAH ETHIOPIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*



**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2025**

## ABSTRAK

Konflik antara *Tigray People's Liberation Front* (TPLF) dan Pemerintah Ethiopia yang berlangsung sejak tahun 2020, telah menjadi salah satu konflik bersenjata paling mematikan di Benua Afrika. Konflik ini berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan kondisi kemanusiaan, yang mencakup aspek kemanusiaan, ekonomi, politik dan regional. Sebagai organisasi regional, Uni Afrika memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan di benua Afrika, melalui kerangka kerja komprehensif *African Peace and Security Architecture* (APSA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Uni Afrika dalam konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan lima strategi prioritas APSA untuk menemukan peran Uni Afrika dalam konflik ini. Dalam implementasinya, peran Uni Afrika sebagai mediator menggunakan strategi prioritas pertama, yaitu *conflict prevention*. Peran Uni Afrika sebagai fasilitator menggunakan strategi prioritas kedua, yaitu *crisis/conflict management*. Peran Uni Afrika sebagai rekonsilitor menggunakan strategi prioritas ketiga dan kelima, yaitu *post-conflict reconstruction and peace* dan *coordination and partnership*. Sedangkan peran Uni Afrika sebagai monitor dan verifikator menggunakan strategi prioritas keempat, yaitu *security strategic security issues*. Dalam perannya, Uni Afrika berhasil memfasilitasi perundingan damai yang menghasilkan *Permanent Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) pada tahun 2022. Namun, keberlanjutan perdamaian di Ethiopia masih bergantung pada implementasi komitmen perjanjian serta langkah-langkah rekonsiliasi jangka panjang.

**Kata Kunci:** Uni Afrika, Konflik, TPLF, Ethiopia, APSA.

## ABSTRACT

The conflict between the Tigray People's Liberation Front (TPLF) and the Ethiopian Government, which has been ongoing since 2020, has emerged as one of the deadliest armed conflicts on the African continent. This conflict has significantly affected regional stability and humanitarian conditions, impacting humanitarian, economic, political, and regional dimensions. As a regional organization, the African Union (AU) holds the mandate to maintain peace and security across the continent through the comprehensive framework of the African Peace and Security Architecture (APSA). This study aims to analyze the role of the African Union in the conflict between the TPLF and the Ethiopian Government. Employing a descriptive qualitative research method and a literature-based approach, the study utilizes five APSA priority strategies to identify the AU's roles in the conflict. In practice, the African Union acted as a mediator by applying the first priority strategy—conflict prevention. As a facilitator, it adopted the second strategy—crisis/conflict management. Its role as a reconciler involved the third and fifth strategies—post-conflict reconstruction and peace, as well as coordination and partnership. Meanwhile, the AU's monitoring and verification functions corresponded with the fourth priority strategy—addressing strategic security issues. Through these roles, the African Union successfully facilitated peace negotiations, which culminated in the signing of the Permanent Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) in 2022. However, the sustainability of peace in Ethiopia remains contingent upon the effective implementation of the agreement's commitments and the pursuit of long-term reconciliation efforts.

**Keywords:** African Union, Conflict, TPLF, Ethiopia, APSA.